

## Keamanan Investor Menjadi Prioritas

Tanggal : Jum'at , 18 Juni 2021  
 Media : Kompas  
 Halaman : 1&15  
 Wartawan : JOE  
 Muatan Berita : Positif  
 Narasumber : Muhammad Lutfi (*Menteri Perdagangan*), Indrasari Wisnu Wardhana. (*Kepala Bappebti*)  
 Rubrik : Halaman Depan  
 Topik : Kripto

### ASET KRIPTO

## Keamanan Investor Menjadi Prioritas

**JAKARTA, KOMPAS** — Perdagangan aset kripto harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk memberikan pemasukan negara melalui pajak. Pemerintah sudah mempersiapkan pendirian bursa kripto dengan seperangkat aturan yang menjamin keamanan, kenyamanan, kerahasiaan, dan keadilan bagi para pihak yang bertransaksi. Transaksi aset kripto juga harus diatur karena perannya semakin besar dalam ekonomi digital yang mendukung perekonomian secara keseluruhan.

Selain persiapan infrastruktur berupa aturan, sosialisasi dan edukasi mengenai perdagangan aset kripto juga memerlukan kerja sama dari regulator, pedagang, serta komunitas investor aset kripto. Risiko pada transaksi aset kripto sering dilupakan karena sebagian orang lebih tergiur pada potensi keuntungannya. Selain itu, masyarakat masih tertarik dengan penawaran investasi bodong dengan mengatasnamakan transaksi aset kripto yang menjanjikan hasil tetap.

"Perdagangan harus bermanfaat bagi semua pihak. Dasar-dasar perdagangan akan kami terapkan dan akan dijabarkan pada aturan. Kami akan bekerja sama dengan institusi yang memiliki yurisdiksi atas keamanan dan kenyamanan bertransaksi ini, seperti OJK serta Bank Indonesia," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada webinar *Kompas Talks* yang diselenggarakan harian *Kompas* bersama Kementerian Perdagangan bertajuk "Mengelola Demam Aset Kripto", Kamis (17/6/2021), di Jakarta.

Dalam diskusi tersebut, hadir pula Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia Rosalia Suci, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, CMO Tokocrypto Nanda Ivens, CEO Indodax Oscar Darmawan, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia M. Deivito, serta *influencer* aset kripto, Wicky Zeroski.

Muhammad Lutfi menegaskan, Kementerian Perdagangan akan mempergunakan sistem *sandbox*, yaitu menjalankan rencana untuk memperkuat ekosistem perdagangan aset kripto sekaligus membenahi aturan agar kian sesuai dengan situasi yang ada. Pada 2020, investor pada aset kripto di Indonesia tercatat sekitar 4 juta orang dan hingga Mei 2021 sudah naik menjadi 6,5 juta orang. Transaksi pun meningkat dari Rp 65 triliun pada 2020 menjadi Rp 370 triliun hingga Mei 2021. Kementerian Perdagangan menargetkan bursa aset kripto sudah dapat beroperasi pada akhir 2021 ini.

### Aspek keamanan

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, keamanan bertransaksi dan perlindungan terhadap konsumen, yaitu para investor kripto, merupakan perhatian utama dalam menyusun aturan perdagangan aset kripto. "Teknologi berkembang sangat cepat. Kami akan mengevaluasi setidaknya setiap enam bulan harus dilihat perkembangannya. Aturan perlu dievaluasi setiap tahun," ujarnya.

Dia menambahkan, para pedagang aset kripto harus memenuhi beberapa sertifikasi ISO yang merupakan standar keamanan. Pemisahan dana investor dari dana perdagangan juga merupakan langkah untuk melindungi investor.

Pengetatan keamanan tak hanya untuk membuat investor terlindungi ketika bertransaksi, tetapi juga mencegah penyalahgunaan transaksi aset kripto untuk hal-hal kriminal, seperti pencucian uang, terorisme, dan sebagai penyimpan aset hasil korupsi. Saat ini ada 13 pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti.

Dalam diskusi tersebut, baik regulator, para pedagang, maupun komunitas aset kripto sepakat bahwa edukasi tentang

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

**(Sambungan dari halaman 1)**

aset kripto perlu dilakukan secara masif. "Edukasi penting supaya banyak yang mendapatkan manfaat," kata Nanda.

Akan tetapi, Wicky Zeroski mencermati masih ada kekurangan layanan dari platform yang diberikan oleh para pedagang aset kripto, seperti ketiadaan layanan fitur pembatasan kerugian atau fitur ambil untung yang dapat melindungi investor.

Perlindungan terhadap konsumen, menurut Oscar Darmawan, dimulai dengan membuat sistem perdagangan yang baik. Ini menyangkut lembaga pendukung, yaitu bursa, kliring, perdagangan, dan depository. "Infrastruktur penting harus ada di Indonesia. Jadi, terlihat siapa yang harus bertanggung jawab sehingga tidak ada risiko kegagalan sistem karena sistem sudah rapi," ucapnya.

Sementara Rosalia menegaskan kembali, aset kripto merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan, tetapi bukan alat pembayaran di Indonesia karena alat pembayaran yang sah adalah mata uang rupiah. (JOE)